



**Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Republik Indonesia**

**Siaran Pers Nomor: 79/HUMAS PMK/III/2023**

Menko PMK Lanjutkan Penyisiran Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Papua

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali melanjutkan penyisirannya dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan pada Selasa (14/3).

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting Provinsi Papua mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 29,5% menjadi 34,6% di tahun 2022. Hal tersebut menjadikannya sebagai wilayah tertinggi ketiga prevalensi angka stuntingnya di Indonesia.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Membramo Jaya H Mansur mengatakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan karena data yang diinput ternyata belum termasuk ke dalam seluruh cakupan desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengakses ke desa yang jaraknya cukup jauh, serta kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas.

"Tidak semua puskesmas memiliki dokter, khususnya di daerah terpencil karena memang cukup susah dijangkau. Biasanya nanti kami meminta dari distrik atau kota maupun kabupaten untuk bisa mengisi kekosongan dokter di puskesmas tersebut." Ujarnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh daerah lainnya, masih adanya permasalahan pada intervensi spesifik seperti kurangnya edukasi konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, rendahnya partisipasi keluarga dalam imunisasi anak, serta pemberian ASI dan makanan tambahan yang kurang optimal.

Sedangkan pada intervensi sensitif permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan edukasi terkait gizi, hingga akses infrastruktur sanitasi serta air bersih yang masih rendah.

Menko Muhadjir berharap agar seluruh kabupaten dan kota memiliki target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian data stunting pada setiap desa di daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem.

"Saya meminta peta untuk setiap daerah yang kira-kira membutuhkan jalan dan juga akses lainnya seperti sanitasi air bersih sehingga nantinya mendapatkan bantuan serta perhatian khusus dari Kementerian PUPR agar penyelesaian mengenai target penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat segera diselesaikan dengan baik," Tutur Muhadjir.

Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Setiap kabupaten dan kota harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya yaitu segera mempercepat pemenuhan Ultra Sonografi dan Antropometri di setiap puskesmas yang nantinya ditindaklanjuti oleh Kemenkes, mempercepat validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta mempercepat pengusulan sanitasi dan air bersih pada Kementerian PUPR.

Tingkat kemiskinan ekstrem pada masing-masing wilayah masih sangat tinggi diatas rata-rata nasional diantaranya pada Provinsi Papua sebesar 7,26%, Papua Tengah sebesar 11,62%, Papua Selatan sebesar 3,98%, dan Papua Pegunungan sebesar 16,50% sementara masih menjadi yang tertinggi se-Indonesia.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti halnya yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dengan mencocokkan data P3KE dengan data keluarga berbasis kampung melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO-Papua).

"Kolaborasi antara data P3KE dengan SIO-PAPUA ini dapat memudahkan kami dalam melaksanakan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting pada masing-masing desa yang ada di wilayah kami," Jelasnya.

Lebih lanjut, penanganan kemiskinan ekstrem juga dilakukan oleh Kabupaten Kerook dengan cara memberikan Program Sembako Masuk Kampung dimana persoalan pangan menjadi perhatian yang serius dan perlu ditangani secara bersama-sama.

"Persoalan pangan menjadi masalah yang serius, oleh karenanya selain program sembako masuk kampung kami juga membangun sentra-sentra ketahanan pangan dengan program penanaman pangan lokal seperti jagung," Jelas Piter Gusbager selaku Bupati Kerook.

Menko Muhadjir mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing daerah. Menurutnya Data P3KE merupakan data kunci yang menjadi dasar dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

"Oleh karena itu, saya mohon kepada Pemprov agar data P3KE segera diturunkan hingga ke tingkat desa, kemudian di verifikasi dan validasi, di buat Surat Keputusannya serta dikirimkan ke Kemenko PMK sehingga kami dapat menyempurnakan datanya karena yang paling paham ada di tingkat desa," Ucapnya.

Pada dialog tersebut turut hadir pula Plh. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Sekda Provinsi Papua Tengah Valentinus Sudarjanto, Bupati Supiori Yan Imbab, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, Bupati Kepulauan Yapen Chyfranus Y. Mambay, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga teknis terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, dan BKKBN.

\*\*\*\*\*

**Bagian Humas dan Perpustakaan,  
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
roinfohumas@kemenkopmk.go.id  
www.kemenkopmk.go.id  
Twitter@kemenkopmk  
IG: kemenko\_pmk**